

Women's Empowerment through the Family Welfare Empowerment Program (PKK) in Wonosari Village Gempol District Pasuruan Regency

[Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wonosari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan]

Mivtha Mauludia¹⁾, Isna Fitria Agustina²⁾

¹⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnaagustina@umsida.ac.id

Abstract. Empowering women through the Family Welfare Empowerment Program (PKK) in Wonosari Village, Gempol District, Pasuruan Regency is an important strategy in encouraging women's contribution to rural development. This study aims to analyze and describe the extent to which the implementation of the PKK program is able to open access, increase participation, strengthen control, and distribute benefits to women in Wonosari Village. The research approach used is qualitative, employing observation, in-depth interviews, and documentation. The research findings indicate that, in terms of access, the PKK program in Wonosari Village provides extensive opportunities for women to participate in skill-building training, although participation remains influenced by the double burden and budget constraints of the village. In terms of participation, women's involvement in the PKK program in Wonosari Village is quite active through talikur bag training, which encourages hands-on practice, experience sharing, and strengthens solidarity, although it has not yet developed into sustainable productive activities due to limited post-training support and guidance. On the control indicator, women in Wonosari Village already have a space to participate in decision-making through deliberation, but their authority remains limited because final decisions depend on village budget resources and regulations. On the benefit indicator, the PKK program in Wonosari Village, through talikur bag-making training, has improved skills, self-confidence, and opened economic opportunities for women. However, without ongoing support and business assistance, the program's benefits remain limited to some participants.

Keywords - Empowerment; Women; Family Welfare Empowerment

Abstrak. Pemberdayaan perempuan melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan merupakan strategi penting dalam mendorong kontribusi perempuan dalam pembangunan pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan program PKK mampu membuka akses, meningkatkan partisipasi, menguatkan kontrol, dan mendistribusikan manfaat bagi perempuan di Desa Wonosari. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada indikator akses, program PKK di Desa Wonosari membuka peluang luas bagi perempuan untuk mengikuti pelatihan keterampilan, meski partisipasi tetap dipengaruhi beban ganda dan keterbatasan anggaran desa. Pada indikator partisipasi, keterlibatan perempuan dalam program PKK Desa Wonosari cukup aktif melalui pelatihan tas talikur yang mendorong praktik langsung, berbagi pengalaman, dan memperkuat solidaritas, meski belum berlanjut menjadi kegiatan produktif berkelanjutan karena minim pendampingan dan dukungan pasca-pelatihan. Pada indikator kontrol, perempuan di Desa Wonosari sudah memiliki ruang terlibat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, namun kewenangan mereka masih terbatas karena keputusan akhir bergantung pada sumber daya dan regulasi anggaran desa. Pada indikator manfaat, program PKK di Desa Wonosari melalui pelatihan pembuatan tas talikur mampu meningkatkan keterampilan, rasa percaya diri, dan membuka peluang ekonomi bagi perempuan. Namun, tanpa adanya pendampingan dan dukungan usaha, manfaat program masih terbatas pada sebagian peserta.

Kata Kunci - Pemberdayaan; Perempuan; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

I. PENDAHULUAN

Pranaka dan Muljarto sebagaimana dikutip oleh Anwas (2013:50) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah proses menumbuhkan eksistensi dan kapasitas individu, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara melalui penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab. Pemberdayaan ini meliputi ranah politik, hukum, pendidikan, serta aspek sosial lainnya, dan menjadi sarana penguatan nilai-nilai, tradisi, dan kearifan lokal sebagai identitas diri baik secara personal maupun komunal.[1] Keterkaitan konsep ini dengan masyarakat sangat erat,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

karena berbagai permasalahan sosial yang dihadapi suatu negara memerlukan kemajuan yang bergantung pada keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat melalui beragam inisiatif pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu strategi penting dalam upaya tersebut adalah pemberdayaan perempuan. Aritonang (2000:142-143) mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilan mereka, sehingga dapat mengakses dan menguasai pengambilan keputusan, sumber daya, serta struktur yang mendukung. Proses ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penyampaian informasi tentang pentingnya peran perempuan dalam masyarakat, yang akan membantu mereka memiliki keterampilan, motivasi, dan kepercayaan diri untuk mengekspresikan diri, membuat keputusan, dan mendorong perempuan lain dalam upaya memperbaiki kehidupan mereka.[2]

Di Indonesia, perempuan telah mulai berorganisasi sejak masa pra-kemerdekaan. Organisasi perempuan pertama di Indonesia adalah Poetri Mardika. Lahirnya Poetri Mardika dan berkembangnya gerakan perempuan di Indonesia merupakan bagian dari gerakan nasional maupun internasional yang memperjuangkan emansipasi, nasionalisme dan kolonialisme. Setelah Poetri Mardika, muncul munculan berbagai organisasi perempuan lainnya yang berkontribusi dalam gerakan nasionalis, seperti *Jong Java Meiskering*, *Young Javanese Girls Circle*, *Wanita Oetomo*, *Aisyiyah*, *Poetri Indonesia*, *Wanita Katolik*, *Wanita Muljo*, *Jong Islamieten Bond* dan banyak lagi. Selama masa kolonial, organisasi-organisasi berkolaborasi dengan gerakan nasionalis untuk melawan ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem kolonial serta memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Hampir tidak ada gerakan perempuan yang dilakukan secara individu untuk mencapai kekuatan, melainkan diwujudkan melalui pembentukan atau keterlibatan dalam organisasi yang dapat mengkonsolidasikan tujuan bersama.[3]

Perkembangan organisasi perempuan tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya berbagai kebijakan pemerintah yang menempatkan isu gender sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sebagai wujud komitmen untuk mendorong, memperkuat, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara menyeluruh dan terkoordinasi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Instruksi ini menekankan pentingnya meningkatkan posisi, peran, dan kualitas perempuan guna tercapainya keadilan serta kesetaraan gender dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.[4] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan pengarusutamaan gender di setiap fase pembangunan nasional. Implementasinya juga harus menjadi bagian yang melekat pada aktivitas utama setiap kementerian maupun lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah mendorong partisipasi perempuan melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017, PKK didefinisikan sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang berasal dari, digerakkan oleh, dan ditujukan kepada masyarakat itu sendiri, dengan tujuan membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak luhur, sehat, sejahtera, mandiri, maju, berkeadilan sosial, serta memiliki kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan.[5] Melihat peran strategis PKK dalam pembangunan masyarakat dan keluarga, penting untuk mengetahui sebaran kelembagaannya di berbagai daerah. Berikut disajikan data jumlah PKK menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024:

Tabel 1. Jumlah PKK Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PKK	No	Kabupaten/Kota	Jumlah PKK
1.	Pacitan	183	20.	Magetan	253
2.	Ponorogo	328	21.	Ngawi	236
3.	Trenggalek	192	22.	Bojonegoro	430
4.	Tulungagung	290	23.	Taban	65
5.	Blitar	270	24.	Lamongan	501
6.	Kediri	547	25.	Gresik	374
7.	Malang	423	26.	Bangkalan	299
8.	Lumajang	226	27.	Sampang	200
9.	Jember	279	28.	Pamekasan	202
10.	Banyuwangi	242	29.	Sumenep	361
11.	Bondowoso	242	30.	Kota Kediri	49
12.	Situbondo	153	31.	Kota Blitar	24
13.	Probolinggo	354	32.	Kota Malang	62
14.	Pasuruan	390	33.	Kota Probolinggo	18
15.	Sidoarjo	371	34.	Kota Pasuruan	39
16.	Mojokerto	322	35.	Kota Mojokerto	21
17.	Jombang	327	36.	Kota Madiun	30
18.	Nganjuk	304	37.	Kota Surabaya	185
19.	Madiun	221	38.	Kota Batu	270

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2025

Berdasarkan Tabel 1, Kabupaten Pasuruan memiliki 390 lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan menduduki posisi kelima dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Angka ini menunjukkan

keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, yang cukup tinggi dalam inisiatif pemberdayaan keluarga. Sebaliknya, daerah perkotaan seperti Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan mencatat jumlah jauh lebih rendah, masing-masing 18 dan 19 kelompok PKK, kemungkinan dipengaruhi dinamika sosial perkotaan. Tingginya jumlah PKK di Kabupaten Pasuruan menandakan kapasitas kuat untuk mendukung program pemberdayaan di tingkat desa, termasuk di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol.

Organisasi PKK, yang merupakan salah satu lembaga masyarakat di desa, memainkan peran krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat, baik dalam pembangunan desa maupun dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Dengan keterampilan yang dimiliki, PKK dapat memberikan berbagai pelatihan kepada masyarakat. Selain itu, dengan potensi alami yang dimiliki oleh perempuan dalam organisasi ini, diharapkan dapat menginspirasi dan membimbing masyarakat untuk terus belajar demi meningkatkan kualitas hidup mereka.[6] Seluruh program PKK pada dasarnya berorientasi pada aksi nyata yang memberdayakan serta berpihak kepada perempuan. Kontribusi perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga sangat signifikan, selain mengurus rumah tangga, mereka juga berperan aktif dalam menopang perekonomian keluarga melalui kegiatan produktif yang membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam menentukan tingkat pemberdayaan, Nursyahbani Katjasungkana sebagaimana dikutip oleh Riant Nugroho (2008) mengidentifikasi empat indikator penting, yaitu: pertama, akses, yang menuntut kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan sumber daya produktif di lingkungannya; kedua, partisipasi, berupa keterlibatan nyata dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset yang tersedia; ketiga, kontrol, yaitu adanya kesempatan yang setara untuk mengendalikan dan menentukan arah pemanfaatan sumber daya tersebut; dan keempat, manfaat, yang berarti hasil pembangunan dan pemanfaatan sumber daya harus dapat dinikmati secara adil oleh semua pihak tanpa diskriminasi gender.[7]

Desa Wonosari memiliki luas wilayah 239,6516 hektar yang terbagi ke dalam 15 desa administratif dan berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data statistik terkini, Desa Wonosari memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.201 jiwa. Salah satu organisasi utama yang mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Wonosari adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Badan ini beroperasi sebagai program terpadu yang mendorong partisipasi lokal dalam pembangunan dan berkontribusi pada inisiatif yang mendorong perbaikan di desa. Inisiatif PKK terutama berfokus pada perempuan, khususnya ibu rumah tangga, sebagai katalis utama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di desa Wonosari, inisiatif PKK diawasi oleh Ibu Hotimah, istri kepala desa, yang berperan penting dalam mempromosikan berbagai kegiatan pembangunan masyarakat akar rumput. Untuk mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan di tingkat desa, diperlukan struktur kelembagaan yang kuat dan tersebar merata di tiap dusun. Ketersediaan kelompok PKK dan jumlah kader di masing-masing wilayah menjadi salah satu indikator penting dalam menjalankan kegiatan secara efektif. Berikut ini merupakan data umum terkait jumlah kelompok dan kader PKK di Desa Wonosari:

Tabel 2. Data Umum PKK Desa Wonosari Tahun 2024

No	Nama Dusun	Jumlah Kelompok			Jumlah Kader					
		PKK RW	PKK RT	DASA WISMA	Anggota TP PKK		Umum		Khusus	
					L	P	L	P	L	P
1.	Talang	2	7	8	11		32		34	
2.	Wonosari	4	4	5	7		24		24	
3.	Jlumbang	6	8	9	10		28		28	
4.	Wonolilo	8	5	6	6		27		27	
5.	Karangan	10	5	6	8		30		30	
	TP PKK DESA/KELURAHAN	30	29	34	42		141		143	

Sumber: Pemerintah Desa Wonosari 2025

Tabel 2 menggambarkan struktur kelembagaan dan keterlibatan masyarakat dalam Program PKK di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang dilaksanakan di lima lingkungan: Talang, Wonosari, Jlumbang, Wonolilo, dan Karang. Terdapat 30 organisasi RW PKK, 29 organisasi RT PKK, dan 34 organisasi Dasa Wisma, dengan Dusun Karang memiliki RW PKK terbanyak (10 organisasi) dan Dusun Jlumbang memiliki Dasa Wisma terbanyak (9 organisasi). Keanggotaan PKK didominasi perempuan, meliputi 42 anggota TP PKK, 141 kader umum, dan 143 kader khusus, menunjukkan perannya sebagai wadah pemberdayaan perempuan sekaligus pembangunan keluarga. Namun, kesenjangan jumlah kelompok di tiap dusun mengindikasikan adanya perbedaan tingkat pemahaman, keterlibatan, dan akses informasi yang menjadi tantangan pemerataan program.

Pelaksanaan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wonosari menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan yang terarah dan berkesinambungan. Program ini dirancang untuk memberikan bimbingan, dukungan, sekaligus pendampingan kepada keluarga agar mampu mencapai kehidupan yang sejahtera, progresif, dan mandiri. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengoperasian sepuluh program pokok PKK yang menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan ketahanan keluarga serta memperkuat kontribusi unit organisasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Komitmen ini sejalan dengan ketentuan dalam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 39 Ayat 1 mengatur tentang pelaksanaan Prakarsa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang mencakup ragam bidang strategis. Bidang-bidang tersebut meliputi penguatan nilai-nilai Pancasila, kerja sama masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, perumahan serta ketahanan keluarga, peningkatan pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kapasitas masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan kesehatan yang terpadu.[8] Untuk meningkatkan produktivitas, inisiatif PKK disegmentasikan menjadi empat Satuan Tugas (Pokja), yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan unik masyarakat setempat. Setiap Pokja bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan melaksanakan 10 program utama PKK, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. Program Kerja (POKJA) PKK di Desa Wonosari

	Program Kerja PKK	Uraian Program PKK
Pokja I	a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	- Pengajian rutin - Arisan setiap bulan sekali
	b. Gotong Royong	- Merayakan hari besar islam - Sosialisasi CEPAK (Cegah Perkawinan Anak).
Pokja II	a. Pendidikan dan Keterampilan	- Peningkatan kesadaran pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	b. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	- Bina Keluarga Balita (BKB) - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - Pelatihan keterampilan ekonomi kreatif - Pelaksanaan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)
Pokja III	a. Pangan	- Hatinya PKK (Halaman asri, Teratur, Indah, dan Nyaman)
	b. Sandang	- Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
	c. Perumahan dan Tatalaksana	- Rumah Desa Sehat (RDS)
Pokja IV	a. Kesehatan	- Posyandu (Pemantauan kesehatan ibu dan anak, Sosialisasi “Isi Piringku”, PHBS, KB, dsb)
	b. Kelestarian Lingkungan Hidup	- Posyandu Lansia (Pemeriksaan kesehatan gratis, Konseling dan Penyuluhan kesehatan)
	c. Perencanaan Sehat	

Sumber: PKK Desa Wonosari 2025

Tabel 3 menyajikan ringkasan berbagai program yang dilaksanakan oleh setiap Kelompok Kerja (Pokja) dalam organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wonosari, salah satunya adalah Program Keterampilan. Melalui program ini, ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya beraktivitas di ranah domestik, seperti mengurus rumah, menonton televisi, atau berbincang tanpa aktivitas produktif, kini memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih jauh, keterampilan tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah secara personal, tetapi juga membuka peluang untuk memperoleh penghasilan sehingga mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Di era globalisasi, keterampilan menjadi sangat penting karena setiap individu dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik melalui pekerjaan formal maupun wirausaha. Oleh karena itu, keterampilan dapat dipandang sebagai modal utama dalam membuka peluang usaha mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan, khususnya bagi perempuan yang selama ini cenderung bergantung pada laki-laki. Dalam konteks ini, peran PKK sangat strategis karena program pemberdayaan yang dilaksanakan bertujuan meningkatkan kemampuan dan potensi perempuan agar memiliki keterampilan serta keahlian dalam menghadapi permasalahan secara mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Hal tersebut tercermin dari kegiatan PKK di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang secara nyata berkontribusi dalam mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan keterampilan.

Program keterampilan yang dikembangkan di Desa Wonosari merupakan bagian dari bidang kerja Pokja II PKK yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi. Pelatihan dan kegiatan yang diselenggarakan tidak hanya bertujuan memperluas pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan rumah tangga dan peluang usaha. Pelaksanaannya umumnya dilakukan di Balai Desa dengan frekuensi yang menyesuaikan alokasi anggaran desa, sehingga efektivitas program bergantung pada dukungan kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Program ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan kepada perempuan agar memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu

menjalani kehidupan secara layak sekaligus berkontribusi dalam membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga.

PKK di Desa Wonosari telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga, khususnya melalui pelatihan keterampilan seperti pembuatan tas, buket bunga, dan hantaran. Dari beragam keterampilan tersebut, pembuatan tas talikur menjadi fokus utama karena dinilai memiliki nilai estetika sekaligus potensi ekonomi yang cukup tinggi. Tas talikur sendiri merupakan bagian dari seni kerajinan makrame atau talikur, yakni cabang seni rupa terapan yang memanfaatkan tali sebagai bahan dasar dalam menghasilkan karya.[9] Program ini diarahkan untuk memberdayakan perempuan, khususnya mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan tidak memiliki akses pekerjaan di luar peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Pemilihan bahan dasar berupa talikur dinilai strategis karena harganya relatif terjangkau, mudah diperoleh di pasaran, serta memungkinkan peserta untuk berlatih dan memproduksi hasil karya secara mandiri. Dengan demikian, program keterampilan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi diri, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Mengkaji penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ari Yohanes Decaprio, Isna Fitria Agustina pada tahun 2024, berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Banjarnendo”, penelitian kualitatif ini menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemberdayaan keuangan perempuan melalui usaha kewirausahaan dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, yang dimaksudkan untuk mendorong strategi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif di Desa Banjarnendo. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di area ini belum berkembang seperti yang diharapkan. Pembatasan akses perempuan terhadap peran gender telah membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan yang menguntungkan, dan otonomi perempuan atas pemberdayaan mereka masih di bawah tingkat yang memadai.[10]

Dalam penelitian terpisah yang dilakukan oleh Rina Carollina pada tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”, ditemukan bahwa kegiatan PKK yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga di Desa Selamanik belum berjalan secara maksimal. Mayoritas perempuan di desa ini berperan sebagai ibu rumah tangga dengan ketergantungan yang tinggi pada pendapatan suami, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi keluarga masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat optimalisasi pelaksanaan program pemberdayaan, seperti kurangnya program pendidikan dan pembinaan yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya dukungan bagi masyarakat, khususnya perempuan, dalam mendapatkan pendanaan usaha yang memadai, minimnya pengembangan usaha koperasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kurangnya program pelatihan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian perempuan di bidang teknologi informasi.[11]

Selain itu, pada tahun 2023 dilakukan penelitian oleh Putri Ayu Nanda dengan judul “Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan PKK di Kecamatan Luyo belum berjalan secara maksimal karena belum memenuhi standar pemberdayaan perempuan yang meliputi kesejahteraan, aksesibilitas, kesadaran, keterlibatan, dan kewenangan. Selain itu, belum tersedianya program yang tepat guna melibatkan perempuan yang belum menikah secara efektif. Tantangan signifikan yang dihadapi PKK dalam menjalankan fungsinya secara efektif di Kecamatan Luyo adalah masih terdapatnya kader yang masih pasif dalam struktur organisasi sehingga menyebabkan kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, masih terdapat kekurangan anggaran operasional yang cukup besar untuk melaksanakan program dan program yang berorientasi ekonomi belum terlaksana secara konsisten. Selain itu, inisiatif yang dijalankan masih kurang inovatif sehingga menghambat peningkatan keterampilan perempuan di Kabupaten Luyo. Selain itu, akses informasi terkait program PKK masih terbatas sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan masyarakat.[12]

Penelitian oleh Abdul Khafidz, Isna Fitria Agustina pada tahun 2024 yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan melalui Pembiayaan Mikro di Badan Usaha Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang jelas meningkatkan efisiensi dan kejelasan peran, sehingga memudahkan keberhasilan implementasi program. Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas dan fragmentasi tugas sangat penting untuk pelaksanaan yang optimal. Penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya kerangka kerja organisasi yang kuat untuk meningkatkan manajemen sumber daya dan responsivitas program, sehingga mendorong pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan perempuan.[13]

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat dua kendala utama yang dihadapi pada bidang keterampilan PKK Desa Wonosari, yaitu: Pertama, minimnya dana. Sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat, kegiatan PKK di Desa Wonosari tidak lagi menerima alokasi anggaran khusus sebagaimana dulu. Dalam sistem penganggaran desa saat ini, PKK masuk ke dalam kategori kegiatan pemberdayaan, sehingga pengalokasian dananya bersifat umum dan tidak secara spesifik ditujukan untuk PKK. Kondisi ini membuat berbagai inisiatif pelatihan hanya

dapat dilaksanakan apabila desa secara resmi menganggarkan. Selain itu, kecenderungan kebijakan desa yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibanding pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan turut membuat pengajuan dana dari PKK sering tertunda atau mendapat porsi yang terbatas. Kedua, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat. Selain keterbatasan dana, hambatan ini tampak pada minimnya keberlanjutan kegiatan pasca-pelatihan serta terbatasnya partisipasi warga. Pelatihan keterampilan, seperti pembuatan tas talikur, umumnya hanya diikuti oleh sebagian kecil peserta atau perwakilan, dan tidak berlanjut menjadi kegiatan produktif yang dikembangkan sebagai usaha. Sebagian besar peserta berhenti pada tahap pelatihan tanpa ada tindak lanjut nyata, sehingga dampak yang dirasakan masyarakat menjadi terbatas. Keadaan ini diperburuk oleh persepsi masyarakat yang cenderung menganggap kegiatan PKK sebagai ranah eksklusif pengurus, bukan sebagai ruang partisipasi bersama. Akibatnya, manfaat program belum dirasakan secara merata, sementara keberlangsungan kegiatan sangat bergantung pada inisiatif segelintir pengurus inti.

Memahami pentingnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan fokus utama penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang berlokasi di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Latar belakang studi ini didasari oleh urgensi kontribusi perempuan dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Ketika perempuan memperoleh dukungan dan akses yang memadai, perempuan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Diharapkan temuan dari penelitian ini akan memberikan perspektif yang berharga dan membantu dalam memperkuat peran perempuan melalui inisiatif PKK, dengan tujuan mencapai keluarga yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menekankan pada pengamatan individu di lingkungan alamiahnya, berinteraksi secara aktif dengan mereka, dan menafsirkan ekspresi linguistik dan sudut pandang mereka terhadap dunia (Sugiyono, 2012).[10] Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji penguatan kapasitas perempuan melalui program PKK di Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Pemilihan Desa Wonosari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa desa ini termasuk aktif dalam mengimplementasikan program PKK yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Informan yang terlibat meliputi Kepala Desa Wonosari, Ketua PKK, anggota PKK, dan perwakilan masyarakat setempat. Sumber-sumber ini dipilih karena signifikansinya terhadap tujuan penelitian dan kapasitasnya dalam menyediakan informasi yang relevan terkait dengan pertanyaan penelitian.

Data yang digunakan dalam studi ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung dengan melibatkan Kepala Desa Wonosari, Ketua PKK, anggota PKK, serta masyarakat di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan tertulis atau bahan visual yang berkaitan dengan program PKK, seperti arsip dan dokumen PKK Desa Wonosari, profil desa, dan referensi tentang pemberdayaan perempuan melalui organisasi, yang semuanya digunakan untuk mendukung keakuratan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi di tempat, wawancara, dan pencatatan. Pendekatan untuk menganalisis data menggunakan kerangka kerja Miles dan Huberman, yang melibatkan pelaksanaan analisis bersamaan dengan pengumpulan data. Metode analisis ini berlangsung dalam tiga tahap utama: penyederhanaan data, penyajian data, dan pengembangan kesimpulan. 1) Reduksi data melibatkan penyaringan informasi, pengenalan komponen utama, dan penemuan pola atau tema dalam data. 2) Penyajian data memerlukan pengorganisasian temuan-temuan relevan ke dalam format naratif atau tabel yang meningkatkan pemahaman. 3) Kesimpulan diturunkan dan divalidasi dengan membuat inferensi dari data yang disediakan, dan ini dilanjutkan dengan fase konfirmasi yang mengarah ke kesimpulan akhir yang lebih kuat dan didukung bukti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di tingkat desa. Selain berorientasi pada kesejahteraan keluarga, PKK juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan perempuan. Walaupun organisasi ini terbuka bagi semua gender, pelaksanaan program dan proses kaderisasi umumnya didominasi oleh kaum perempuan. Dalam studi ini, analisis mengenai pemberdayaan perempuan melalui program PKK di Desa Wonosari mengacu pada kerangka teori pemberdayaan perempuan yang diusulkan oleh Nursyahbani Katjasungkana, yang dikutip oleh Riant Nugroho (2008). Teori ini menyoroti empat indikator utama dalam pemberdayaan perempuan, yaitu akses terhadap sumber daya,

partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, kontrol atas pemanfaatan sumber daya, serta distribusi manfaat yang adil bagi perempuan sebagai hasil dari proses pembangunan.

A. Akses

Akses dalam konteks pemberdayaan dapat dipahami sebagai jaminan bahwa keterlibatan serta penerimaan manfaat dari suatu kebijakan atau program dilakukan secara adil tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan kata lain, akses mencerminkan hak yang sama bagi setiap individu dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungannya. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber-sumber produksi seperti tanah, pekerjaan, dan modal adalah hal yang memengaruhi ketimpangan yang dialami mereka. Kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, mengakses informasi, dan menempati posisi kerja dengan upah tinggi umumnya masih lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini juga berdampak pada terbatasnya peluang perempuan untuk mengembangkan keterampilan baru dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi.[7]

Dalam konteks Desa Wonosari, PKK hadir sebagai organisasi masyarakat yang berperan membuka akses seluas-luasnya bagi warga untuk bergabung tanpa adanya aturan atau persyaratan khusus. Meski demikian, pada praktiknya anggota aktif PKK mayoritas adalah perempuan, sementara keterlibatan laki-laki relatif jarang ditemukan. Proses rekrutmen yang sederhana menjadikan PKK wadah terbuka bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan berbasis komunitas, terutama melalui kegiatan keterampilan dan program pemberdayaan. Hal ini menegaskan bahwa akses menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana perempuan memperoleh kesempatan yang setara dalam memanfaatkan sumber daya produktif, baik berupa pelatihan maupun dukungan modal usaha. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ketua PKK Desa Wonosari, Ibu Hotimah, yang menyampaikan bahwa:

“Kalau jumlah anggota aktif PKK semuanya perempuan, tidak ada laki-laki. Karena masih banyak yang berpandangan kalau PKK itu ya untuk ibu-ibu, laki-laki malu ikut atau merasa bukan tempatnya. Apalagi kegiatan PKK itu sukarela, nggak ada bayaran, jadi mereka enggan ikut. Tapi kalau perempuan, siapa saja bisa ikut, tidak pandang umur, baik ibu rumah tangga atau yang kerja pun bisa ikut. Yang penting, semua perempuan bisa ikut dan tidak dibatasi, yang penting niat.” (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keanggotaan PKK pada dasarnya terbuka luas bagi seluruh perempuan, baik yang berstatus sebagai ibu rumah tangga maupun perempuan bekerja, tanpa adanya batasan usia maupun persyaratan khusus. Hal ini menegaskan bahwa PKK berupaya menghadirkan inklusivitas dalam partisipasi perempuan. Namun demikian, pandangan masyarakat yang masih menganggap PKK sebagai wadah khusus bagi perempuan menimbulkan kesenjangan partisipasi, di mana laki-laki enggan untuk terlibat karena merasa kegiatan PKK bukan ranahnya, terlebih sifat kegiatan yang bersifat sukarela tanpa imbalan semakin memperkuat alasan ketidakikutsertaan mereka. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa secara struktural PKK menyediakan akses yang setara bagi semua perempuan, tetapi akses tersebut belum sepenuhnya bersifat inklusif gender karena keterlibatan laki-laki masih terhambat oleh konstruksi sosial dan persepsi budaya. Untuk memahami lebih lanjut karakteristik sosial-ekonomi para anggota aktif, berikut disajikan Tabel 4 mengenai mata pencaharian anggota PKK Desa Wonosari:

Tabel 4. Mata Pencaharian Warga Perempuan Aktif Program PKK di Desa Wonosari

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Buruh Pabrik	2
2.	Guru	2
3.	Wirausaha	16
4.	Perangkat Desa	2
5.	Ibu Rumah Tangga	20
	Jumlah	42

Sumber: PKK Desa Wonosari 2025

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah anggota aktif PKK di Desa Wonosari mencapai 42 orang dengan latar belakang mata pencaharian yang beragam. Dari jumlah tersebut, mayoritas anggota berasal dari kalangan ibu rumah tangga sebanyak 20 orang, diikuti oleh perempuan yang berwirausaha sebanyak 16 orang. Sementara itu, anggota lainnya berasal dari buruh pabrik, guru, dan perangkat desa, masing-masing berjumlah 2 orang. Data ini

memperlihatkan bahwa keanggotaan PKK dapat diakses oleh perempuan dari berbagai status pekerjaan, baik yang memiliki aktivitas di sektor domestik maupun di sektor publik. Keragaman ini mengindikasikan bahwa PKK berhasil menghadirkan ruang partisipasi yang relatif terbuka dan inklusif bagi perempuan, tanpa memandang perbedaan pekerjaan atau latar belakang ekonomi. Ibu rumah tangga yang sebelumnya lebih banyak terikat pada ranah domestik tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan PKK, sementara perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal juga dapat menyesuaikan keterlibatannya.

Selain melalui keberagaman profesi, aspek akses juga dapat ditinjau dari kemudahan perempuan memperoleh informasi terkait kegiatan pelatihan PKK. Mekanisme komunikasi yang sederhana, seperti melalui grup WhatsApp dan pengumuman langsung dari pengurus, membuat informasi terkait program pelatihan dapat dijangkau oleh hampir seluruh anggota. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan struktural dalam mengakses program relatif kecil, karena setiap perempuan pada dasarnya memiliki peluang yang sama untuk bergabung maupun mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Kendati demikian, tantangan justru lebih banyak muncul pada aspek personal, misalnya keterbatasan waktu akibat beban ganda antara urusan domestik dan kegiatan organisasi. Namun dengan adanya dukungan keluarga, banyak anggota tetap mampu terlibat aktif. Fakta ini menegaskan bahwa akses terhadap kegiatan PKK telah tersedia secara terbuka, meski partisipasi penuh masih sangat dipengaruhi oleh kondisi internal rumah tangga dan dukungan lingkungan sosial. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Ibu Rani salah satu anggota PKK Desa Wonosari yang menuturkan bahwa:

“Saya mengetahui program pelatihan tas talikur dari pengurus PKK yang menyebarkan informasinya lewat grup WhatsApp PKK, jadi semua orang bisa tahu. Hambatan utama paling soal waktu, karena harus membagi perhatian antara urusan rumah tangga dengan kegiatan pelatihan. Namun berkat dukungan keluarga, saya tetap bisa mengikuti kegiatan tersebut.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap program pelatihan tas talikur di Desa Wonosari telah difasilitasi secara terbuka melalui mekanisme penyebaran informasi yang sederhana namun efektif, yaitu lewat grup WhatsApp PKK. Media komunikasi ini memungkinkan setiap anggota PKK memperoleh informasi secara cepat dan merata tanpa adanya pembatasan tertentu. Hal ini menegaskan bahwa program pelatihan telah dirancang dengan prinsip inklusif, di mana seluruh anggota memiliki peluang yang sama untuk terlibat. Meskipun demikian, hambatan dalam aspek akses tidak sepenuhnya hilang, sebab faktor waktu menjadi kendala utama bagi perempuan yang harus menyeimbangkan peran domestik dengan kegiatan pemberdayaan. Dukungan keluarga kemudian berperan penting dalam memastikan keberlanjutan partisipasi, karena tanpa adanya legitimasi dari lingkungan terdekat, perempuan berpotensi kesulitan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dengan demikian, wawancara ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pelatihan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi dan kesempatan formal dari organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial keluarga yang menopang atau justru membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan.

Dalam konteks program pelatihan keterampilan di Desa Wonosari, akses menjadi aspek penting yang menentukan keberlangsungan kegiatan. PKK berupaya memberikan ruang bagi anggotanya untuk mengikuti berbagai bentuk pelatihan, termasuk pembuatan tas talikur, sebagai sarana peningkatan kapasitas perempuan di tingkat rumah tangga. Namun demikian, keterbukaan akses ini masih sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal, khususnya dari pemerintah desa. Artinya, meskipun PKK memiliki inisiatif dalam merancang kegiatan, pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara mandiri tanpa adanya alokasi dana dari desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan wadah organisasi, tetapi juga erat kaitannya dengan faktor struktural berupa dukungan anggaran. Hal ini ditegaskan melalui wawancara bersama Ketua PKK Desa Wonosari, Ibu Hotimah, yang menyampaikan bahwa:

“Hambatan yang paling terasa adalah persoalan dana. Kalau desa tidak mengalokasikan anggaran, maka pelatihan seperti ini tidak bisa terlaksana. Jadi memang sangat bergantung pada dukungan pendanaan dari desa.” (Hasil wawancara tanggal 24 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek akses dalam program pelatihan PKK, khususnya pelatihan tas talikur di Desa Wonosari, masih sangat ditentukan oleh faktor pendanaan dari pemerintah desa. Akses warga terhadap kegiatan pelatihan tidak semata-mata dipengaruhi oleh minat atau kesiapan peserta, melainkan juga oleh ketersediaan anggaran yang dialokasikan melalui kebijakan desa. Dengan kata lain, meskipun kebutuhan dan antusiasme masyarakat cukup tinggi, keberlangsungan program sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah desa. Hal ini menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dapat menjadi hambatan utama yang membatasi akses perempuan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas, sehingga tidak semua rencana pelatihan dapat terwujud setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa akses informasi terkait pelatihan PKK di Desa Wonosari relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Penyebaran informasi melalui grup WhatsApp PKK menjadi sarana efektif yang memungkinkan seluruh anggota memperoleh kabar secara cepat dan merata, sehingga tidak ada batasan khusus bagi siapa pun yang ingin terlibat. Hal ini memperlihatkan bahwa dari sisi penyediaan informasi, PKK berupaya menghadirkan keterbukaan dan transparansi agar kegiatan dapat diikuti oleh semua perempuan tanpa hambatan struktural. Namun demikian, akses yang terbuka tersebut masih menghadapi kendala pada aspek waktu, di

mana perempuan seringkali harus membagi perhatian antara tanggung jawab rumah tangga dengan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan akses bukan terletak pada sistem organisasi, melainkan pada beban ganda yang melekat pada peran perempuan dalam keluarga. Meski begitu, dukungan keluarga berperan penting sebagai faktor pendukung yang memungkinkan perempuan tetap bisa aktif berpartisipasi.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori indikator akses dari Nursyahbani Katjasungkana dalam perbincangan dengan Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional, Riant Nugroho (2008), menunjukkan bahwa perempuan di Desa Wonosari telah memperoleh hak dan kesempatan yang relatif setara untuk terlibat dan mengakses sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, informasi, hingga fasilitas kegiatan. Katjasungkana menekankan bahwa indikator akses tidak hanya bermakna teknis, tetapi juga harus dilihat dari adanya penghapusan hambatan struktural dan budaya yang menghalangi perempuan memperoleh kesempatan yang sama. Dalam konteks Desa Wonosari, masih terdapat hambatan kultural berupa stigma bahwa PKK adalah domain eksklusif perempuan, sehingga laki-laki enggan terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa akses belum sepenuhnya setara secara sosial, meskipun secara struktural tidak ada pembatasan eksplisit terhadap keikutsertaan siapa pun. Dikaitkan pada penelitian terdahulu menurut Ari Yohanes Decaprio, Isna Fitri Agustina pada tahun 2024 dalam penelitiannya berjudul "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Desa Banjarnendo", ditemukan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan di area ini belum berkembang seperti yang diharapkan. Pembatasan akses perempuan terhadap peran gender telah membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan yang menguntungkan, dan otonomi perempuan atas pemberdayaan mereka masih di bawah tingkat yang memadai.

B. Partisipasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam suatu proses sosial, politik, ekonomi, maupun pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama secara demokratis. Partisipasi tidak hanya sebatas hadir dalam kegiatan, melainkan juga mencakup kontribusi pemikiran, pengambilan keputusan, hingga keterlibatan dalam pelaksanaan program dan evaluasinya. Konsep partisipasi menekankan adanya kesetaraan hak dan kesempatan, sehingga setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh manfaat yang setara dari proses tersebut.[14] Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil warga, meningkatkan rasa memiliki, serta memperkuat akuntabilitas sosial. Partisipasi juga menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan karena mencerminkan adanya peningkatan kapasitas, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dalam hal ini masyarakat khususnya perempuan, diharapkan dapat memperluas keterlibatan mereka dalam pembelajaran tentang lingkungan dan diri mereka sendiri dengan bantuan paradigma pemberdayaan ini.[15] Kebebasan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan sosial menjadi kunci dalam mendorong kemajuan masyarakat. Partisipasi aktif perempuan berarti keterlibatan mereka secara rutin dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan program, sehingga mereka memiliki peran strategis dalam pembangunan.[10]

Implementasi konsep tersebut dapat terlihat dalam praktik pemberdayaan yang dilakukan melalui program pelatihan keterampilan di PKK Desa Wonosari. Pada pelatihan pembuatan tas talikur, keterlibatan perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi diwujudkan melalui proses belajar hingga praktik langsung dalam menghasilkan produk. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan sarana untuk menyerap pengetahuan baru sekaligus mengaplikasikannya secara mandiri. Partisipasi juga berkembang dalam interaksi sosial, ketika anggota saling berbagi pengalaman dan membantu sesama peserta yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, pelatihan berfungsi tidak hanya sebagai ruang peningkatan keterampilan individual, tetapi juga sebagai arena kolaborasi yang memperkuat solidaritas antaranggota. Hal ini tercermin dari pengalaman salah satu anggota PKK, Ibu Indah, yang menuturkan:

"Saya ikut aktif dari awal sampai akhir. Tidak hanya mendengarkan, saya juga langsung praktik membuat tas sendiri. Bahkan saat ada teman yang kesulitan, saya mencoba membantu karena saya memang suka dengan kerajinan." (Hasil wawancara tanggal 25 Mei 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi anggota PKK dalam program pelatihan tidak berhenti pada kehadiran atau mendengarkan materi semata, tetapi berkembang menjadi keterlibatan aktif yang mencakup praktik langsung serta interaksi sosial antarpeserta. Keterlibatan semacam ini mencerminkan adanya motivasi intrinsik dan rasa memiliki terhadap kegiatan, sehingga pelatihan berfungsi tidak hanya sebagai sarana peningkatan keterampilan individu, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi yang memperkuat solidaritas kelompok. Dengan demikian, indikator partisipasi dapat dipahami tidak hanya dari segi kuantitas kehadiran, melainkan juga kualitas keterlibatan peserta melalui kontribusi aktif dalam mendukung keberhasilan program. Untuk memperjelas bentuk keterlibatan tersebut, berikut ditampilkan dokumentasi kegiatan partisipasi anggota PKK dalam pelatihan keterampilan tas talikur pada Gambar 1.

Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Pembuatan Tas Talikur oleh PKK Desa Wonosari



Sumber: PKK Desa Wonosari 2025

Berdasarkan Gambar 1, pelaksanaan pelatihan pembuatan tas talikur menunjukkan adanya keterlibatan anggota PKK dalam mengikuti kegiatan. Peserta terlihat tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga aktif mencoba mempraktikkan teknik secara langsung serta berdiskusi dengan instruktur maupun sesama anggota. Partisipasi tersebut tidak hanya mencakup aspek kehadiran, tetapi juga keterlibatan dalam proses pembelajaran yang membangun interaksi sosial, kerja sama, dan semangat belajar bersama. Lebih jauh, kegiatan pelatihan ini memperlihatkan manfaat nyata bagi peserta, terutama dalam peningkatan keterampilan teknis, tumbuhnya rasa percaya diri, serta terbukanya peluang ekonomi baru. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan mengenai teknik merajut, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kreativitas perempuan desa agar mampu mengubah hasil keterampilan menjadi produk bernilai jual.

Pelatihan pembuatan tas talikur di Desa Wonosari dipimpin oleh Ibu Hajar, seorang instruktur yang memiliki pengalaman dalam kerajinan tangan. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk mendukung kemandirian ekonomi para ibu PKK, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada suami dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Sebelum pelatihan dimulai, peserta diberikan perlengkapan seperti gunting, talikur, resleting, kain lapis, serta benang dan jarum jahit untuk mendukung praktik pembuatan tas. Dari total 42 anggota PKK Desa Wonosari yang mengikuti pelatihan, hanya 15 orang yang berkesempatan mengikuti praktik langsung sebagai perwakilan karena keterbatasan dana. Proses pembelajaran menggunakan metode *learning by doing*, di mana peserta secara bertahap membuat tas mulai dari tahap dasar hingga menjadi produk jadi. Metode ini dinilai efektif karena tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, dan motivasi berwirausaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua sesi pada hari Sabtu dan Minggu, masing-masing selama tiga jam (pukul 09.00–11.00 WIB) di Balai Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Waktu pelaksanaan yang ditentukan pada pukul 09.00 WIB dipilih agar peserta, terutama ibu rumah tangga, dapat menyelesaikan tugas domestik mereka terlebih dahulu, sehingga dapat berpartisipasi dengan lebih maksimal. Kehadiran anggota dalam pelatihan menunjukkan komitmen mereka untuk meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian demi memperoleh keterampilan baru serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Proses pembelajaran berlangsung dalam suasana yang interaktif, di mana instruktur memberikan arahan langsung dan peserta aktif terlibat dengan alat yang disediakan. Partisipasi ini juga berfungsi sebagai platform untuk berbagi pengalaman, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat motivasi dalam menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Jika ditinjau lebih jauh, partisipasi dalam program pemberdayaan perempuan di Desa Wonosari masih menghadapi keterbatasan. Antusiasme peserta memang terlihat pada tahap awal pelatihan, tetapi belum berlanjut menjadi aktivitas produktif yang berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak hanya dapat diukur dari kehadiran fisik dalam pelatihan, melainkan juga dari sejauh mana keterampilan yang diperoleh mampu dioptimalkan untuk mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga. Keterbatasan dalam pendampingan dan dukungan pasca-pelatihan menjadi faktor yang menghambat keberlanjutan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh salah satu peserta, Ibu Nur, yang menyampaikan:

"Belum maksimal. Habis diajarin ya selesai begitu saja, tidak ada pendampingan untuk melanjutkan usaha atau mengembangkan keterampilan. Jadi kesannya kurang berkelanjutan, kurang ada gregetnya. Hal tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap menurunnya keterlibatan ibu-ibu, Mungkin itu juga yang membuat ibu-ibu jadi kurang antusias karena belum ada hasil nyata yang bisa dirasakan." (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa indikator partisipasi dalam program pemberdayaan perempuan di Desa Wonosari masih berada pada tahap keterlibatan awal, yaitu sekadar hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan. Artinya, partisipasi belum berkembang ke arah yang lebih substantif, seperti keterlibatan berkelanjutan dalam praktik, produksi, maupun pemanfaatan hasil pelatihan untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa program belum sepenuhnya berhasil membangun motivasi dan komitmen jangka panjang dari peserta, karena kurangnya pendampingan, monitoring, serta dukungan pasca-pelatihan. Dengan demikian, indikator partisipasi dapat disimpulkan tidak hanya diukur dari keikutsertaan dalam kegiatan, tetapi juga dari kemampuan warga untuk

melanjutkan, mengembangkan, dan menginternalisasi keterampilan yang diberikan agar benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Rina Carollina pada tahun 2022 dalam penelitiannya berjudul "Pemberdayaan Perempuan Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis", ditemukan bahwa rendahnya partisipasi perempuan menjadi faktor utama belum optimalnya pelaksanaan program PKK, disebabkan oleh kurangnya pelatihan, akses pendanaan, serta pembinaan teknis. Hal ini berbeda dengan kondisi di Desa Wonosari, di mana pelibatan perempuan dalam berbagai program pemberdayaan berlangsung aktif meskipun masih terkendala oleh aspek pendanaan dan frekuensi kegiatan.

C. Kontrol

Kontrol dalam konteks pemberdayaan perempuan merujuk pada kemampuan perempuan untuk memiliki kuasa dan wewenang dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Konsep ini tidak hanya menekankan pada partisipasi formal dalam kegiatan, melainkan juga mencakup hak untuk mengelola, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik di ranah ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan adanya kontrol, perempuan tidak hanya menjadi objek penerima manfaat program, tetapi juga bertransformasi menjadi subjek yang mampu mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis di tingkat komunitas. Dalam program pemberdayaan desa, kontrol berarti perempuan terlibat secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta meninjau ulang setiap kebijakan yang diambil oleh organisasi desa maupun pemerintah. Kontrol menjadi indikator esensial karena menunjukkan adanya kemandirian, kesadaran kritis, dan kekuatan perempuan dalam menegosiasikan hak-haknya secara adil dan setara dengan laki-laki.[16]

Sebagai bentuk nyata di Desa Wonosari, indikator kontrol dapat diamati melalui proses pengambilan keputusan terkait program pelatihan keterampilan. Mekanisme musyawarah menjadi sarana utama bagi anggota untuk menyampaikan aspirasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif keterampilan yang relevan dengan kebutuhan warga. Namun, setiap keputusan tetap harus menyesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, khususnya dukungan dana dari pemerintah desa. Oleh karena itu, meskipun banyak usulan muncul dalam forum, hanya program yang dinilai realistis dan sesuai dengan prioritas anggaran yang dapat direalisasikan. Kondisi ini terlihat dalam pemilihan pelatihan pembuatan tas talikur, yang akhirnya diputuskan karena dianggap tepat guna sekaligus dapat dijalankan dengan dukungan finansial yang tersedia. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Ketua PKK Desa Wonosari, Ibu Hotimah yang menyampaikan bahwa:

“Saya tiap ada acara-acara apa untuk pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah dengan yang lain, misalnya musyawarah untuk memilih jenis keterampilan. Tapi keputusan akhirnya tetap bergantung pada dana dari desa, jadi tidak semua usulan bisa dilaksanakan. Dalam hal pelatihan pembuatan tas talikur ini, pilihan tersebut akhirnya disetujui karena dinilai sesuai dengan kebutuhan anggota sekaligus realistis dengan dukungan anggaran yang ada.” (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kontrol dalam pelaksanaan program PKK tidak hanya bergantung pada aspirasi anggota, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya dukungan dana dari pemerintah desa. Mekanisme musyawarah memberikan ruang bagi anggota untuk berpartisipasi dalam menentukan jenis keterampilan yang akan dilaksanakan, namun keputusan akhir tetap berada dalam kerangka keterbatasan anggaran. Dengan demikian, kontrol yang dimiliki perempuan dalam konteks ini bersifat relatif, karena meskipun mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam pengambilan keputusan, realisasi usulan sangat ditentukan oleh faktor struktural berupa dukungan finansial. Keputusan menyelenggarakan pelatihan pembuatan tas talikur menunjukkan adanya keseimbangan antara aspirasi anggota dan pertimbangan praktis, sehingga kegiatan yang dipilih tidak hanya sesuai dengan kebutuhan perempuan, tetapi juga memungkinkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

Lebih jauh, keterbatasan kontrol ini juga dipertegas oleh pandangan pemerintah desa. Aspek kontrol dalam program PKK pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh musyawarah internal, tetapi juga oleh regulasi desa yang mengatur penggunaan anggaran. Pelatihan keterampilan seperti pembuatan tas talikur, meskipun dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, pada praktiknya tetap bergantung pada kebijakan desa, terutama dalam hal pendanaan dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Dengan kata lain, ruang gerak program tidak sepenuhnya berada pada inisiatif PKK atau warga, melainkan mengikuti regulasi yang berlaku terkait penggunaan anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol dalam penyelenggaraan program tidak hanya berada di tangan pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan administratif dan keterbatasan dana yang tersedia. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Desa Wonosari, Bapak Daman Huri, menjelaskan bahwa:

“Kalau di desa itu kita kerja mengikuti aturan. Nah, program PKK itu masuk dalam program pemberdayaan masyarakat. Jadi ya otomatis kita dukung, baik dari segi pendanaan, fasilitas kegiatan, sarana, dan prasarana. Arah programnya juga disesuaikan kebutuhan warga, kayak penanganan stunting misalnya, itu kan udah jadi bagian dari tugas PKK juga. Tapi ya semua tetap harus sesuai aturan penganggaran. Jadi meskipun kita punya

banyak ide atau rencana, tetap aja baliknya ke dana. Kita ini masih terbatas, terutama soal aturan penggunaan anggarannya. Harapannya sih ke depan ada aturan yang lebih jelas dan spesifik yang bisa mendukung langsung program-program seperti ini.” (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek kontrol dalam penyelenggaraan program PKK di Desa Wonosari sangat erat kaitannya dengan regulasi desa, khususnya aturan penganggaran. Meskipun pemerintah desa memberikan dukungan terhadap program PKK, baik dari sisi pendanaan, fasilitas, maupun sarana prasarana, implementasinya tidak dapat dilepaskan dari mekanisme administrasi yang berlaku. Hal ini berarti setiap ide atau rencana kegiatan, termasuk pelatihan pembuatan tas talikur, harus disesuaikan dengan keterbatasan dana dan aturan penggunaan anggaran yang ada. Dengan demikian, ruang kontrol PKK terhadap jalannya program masih dipengaruhi secara signifikan oleh regulasi desa, bukan sepenuhnya berada pada kewenangan internal organisasi. Kondisi ini juga mengindikasikan adanya ketergantungan pada kebijakan pemerintah desa, sehingga fleksibilitas dalam mengembangkan program pemberdayaan perempuan masih terbatas. Harapannya, ke depan dapat hadir regulasi yang lebih spesifik agar PKK memiliki keleluasaan lebih besar dalam mengarahkan dan mengoptimalkan program sesuai kebutuhan masyarakat.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu oleh Putri Ayu Nanda pada tahun 2023 yang berjudul "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar", ditemukan bahwa PKK di Kecamatan Luyo belum menunjukkan kontrol yang kuat dari perempuan dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan kegiatan organisasi. Hal ini disebabkan oleh pasifnya beberapa kader, kurangnya inovasi program, dan keterbatasan akses informasi yang menyebabkan perempuan tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses musyawarah atau pengelolaan sumber daya. Hal ini berbeda dengan kondisi di Desa Wonosari, di mana kontrol perempuan tercermin dari keterlibatan aktif dalam musyawarah pengambilan keputusan, transparansi pengelolaan dana, dan evaluasi program yang terbuka. Artinya, kontrol di Desa Wonosari telah bersifat kolektif dan partisipatif. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas kontrol dalam pemberdayaan perempuan sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan aktif kader serta pola komunikasi terbuka dalam struktur organisasi.

D. Manfaat

Menurut Katjasungkana sebagaimana dikutip oleh Nugroho (2008), konsep manfaat dimaknai sebagai kondisi ketika baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil pembangunan dan pemanfaatan sumber daya secara adil tanpa adanya diskriminasi gender. Apa yang dirasakan oleh masyarakat terkhususnya perempuan dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perempuan mampu mengasah kemampuan atau skill mereka dalam menciptakan sebuah karya atau meningkatkan pengetahuan.[15] Dalam hal ini organisasi sebagai wadah bagi sekelompok orang untuk mengembangkan potensi dirinya harus memiliki nilai manfaat yang diperoleh.

Implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat desa dapat dilihat melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam konteks program PKK di Desa Wonosari, pelatihan keterampilan seperti pembuatan tas talikur menjadi salah satu sarana penting bagi perempuan untuk memperoleh manfaat nyata dari kegiatan pemberdayaan. Program ini tidak hanya memberikan tambahan keterampilan praktis, tetapi juga membuka peluang bagi ibu-ibu untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi. Melalui keterampilan tersebut, perempuan didorong untuk lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperluas peran mereka di luar ranah domestik. Indikator manfaat tampak dari sejauh mana program PKK berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Perempuan tidak hanya membantu penghasilan keluarga, tetapi juga memperoleh peningkatan rasa percaya diri, kemandirian, dan partisipasi sosial. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ketua PKK Desa Wonosari, Ibu Hotimah yang menyampaikan bahwa:

“Melalui pelatihan membuat tas talikur, diharapkan ibu-ibu PKK bisa punya keterampilan yang menghasilkan dan membantu perekonomian keluarga. Artinya, kesejahteraan keluarga bisa lebih meningkat. Kalau dulu sebelum ikut PKK mungkin hanya di rumah saja, sekarang setelah ikut pelatihan jadi ada kegiatan, bisa berorganisasi, dan ikut berkontribusi. Jadi ada bantuan dari ibu, bukan bapak saja. Ibu-ibu sudah mulai tidak malu menopang perekonomian keluarga, jadi mandiri, ada pemasukan.” (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manfaat program pelatihan tas talikur tidak hanya terletak pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pelatihan memberi peluang bagi perempuan untuk memperoleh tambahan penghasilan, sehingga beban ekonomi keluarga tidak sepenuhnya bertumpu pada suami. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam kegiatan PKK menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian, karena mereka dapat membuktikan bahwa peran domestik dapat berjalan beriringan dengan kontribusi produktif di ranah publik. Dengan demikian, Keterlibatan perempuan dalam PKK juga menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka mampu berkontribusi secara produktif di ranah publik tanpa meninggalkan peran domestik. Indikator manfaat dapat dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan keluarga

sekaligus penguatan posisi perempuan dalam struktur sosial. Manfaat tersebut juga dirasakan langsung oleh peserta, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Indah, salah satu anggota PKK:

"Bagi saya, manfaat ikut PKK itu terasa sekali. Dulu saya hanya diam di rumah, sekarang jadi lebih berani dan percaya diri karena disini ikut PKK itu seperti 'wah'. Kebetulan saya memang sudah punya dasar merajut, jadi waktu ada pelatihan membuat tas talikur, saya langsung tertarik untuk ikut. Dari pelatihan itu, saya memperoleh keterampilan baru dan semakin percaya diri karena mampu menghasilkan karya sendiri. Alhamdulillah, sekarang saya sudah mulai menjalankan usaha kecil-kecilan menjual tas talikur, meskipun skalanya masih kecil tapi selalu ada saja yang beli." (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa kegiatan PKK, khususnya pelatihan keterampilan, tidak hanya sebagai media pembelajaran teknis tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri serta mendorong motivasi ekonomi. Pengalaman dari pelatihan berbasis kerajinan bahkan dapat menjadi titik awal lahirnya usaha rumah tangga, meski masih dalam skala kecil. Manfaat program tampak pada peningkatan kapasitas individu, terbukanya peluang ekonomi baru, serta bertambahnya kontribusi perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. Salah satu contoh produk hasil pelatihan yang diproduksi sekaligus dipasarkan ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Produk Tas Talikur Hasil Pelatihan yang Diproduksi dan Dipasarkan Oleh Peserta PKK



Sumber: PKK Desa Wonosari 2025

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa hasil pelatihan pembuatan tas talikur dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota PKK, khususnya dalam aspek peningkatan keterampilan teknis sekaligus rasa percaya diri. Produk yang dihasilkan tidak hanya menjadi wujud keterampilan baru, tetapi juga membuka peluang untuk dimanfaatkan secara ekonomi. Contoh tas talikur yang ditunjukkan pada gambar merupakan hasil karya peserta pelatihan yang berhasil dipasarkan, sehingga menunjukkan bahwa manfaat kegiatan PKK tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran, melainkan juga berdampak pada upaya kemandirian dan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, indikator manfaat dalam program ini tampak pada peningkatan kapasitas individu, tumbuhnya motivasi untuk berdaya, serta terbukanya peluang ekonomi meskipun dalam lingkup yang masih sederhana.

Meskipun demikian, capaian manfaat tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan karena setelah pelatihan berakhir belum tersedia tindak lanjut yang dapat memperkuat hasil pembelajaran, misalnya pendampingan dalam memasarkan produk atau pengembangan usaha. Kondisi ini membuat keterampilan yang diperoleh belum seluruhnya berkembang menjadi aktivitas produktif yang berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan oleh salah satu anggota PKK, Ibu Nur, yang menyampaikan bahwa pelatihan memang bermanfaat, tetapi karena tidak ada keberlanjutan, hanya sebagian kecil peserta yang benar-benar mampu mengembangkan keterampilan tersebut ke arah yang lebih bernilai ekonomi. Seperti diungkapkan oleh salah satu anggota PKK, Ibu Nur, yang menyampaikan:

"Sebetulnya, pelatihan pembuatan tas talikur yang diadakan oleh PKK itu bagus dan sangat bermanfaat. Sayangnya, setelah pelatihan selesai, tidak ada tindak lanjut. Jadi, ya, terasa kurang maksimal. Habis diajarin, ya sudah selesai gitu aja, nggak ada pendampingan atau kelanjutan pengembangan usaha, misalnya cara memasarkan dan mempromosikan produk. Karena yang aktif melanjutkan hanya sebagian kecil peserta, manfaat ekonomi akhirnya hanya dirasakan oleh individu yang benar-benar mengembangkan keterampilan tersebut. Padahal, kalau ada tindak lanjut, saya yakin manfaatnya bisa lebih luas lagi." (Hasil wawancara tanggal 22 Mei 2025)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun pelatihan keterampilan yang diselenggarakan PKK memberi manfaat positif, keberhasilan program belum sepenuhnya optimal karena ketiadaan mekanisme lanjutan. Tanpa pendampingan, pembinaan usaha, atau bimbingan dalam pemasaran produk, keterampilan yang diperoleh peserta cenderung tidak berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh sebagian kecil peserta yang secara mandiri melanjutkan usaha mereka, sementara potensi manfaat bagi anggota PKK secara kolektif belum maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan berkelanjutan, monitoring,

dan strategi pengembangan usaha agar program pemberdayaan benar-benar berdampak luas bagi seluruh anggota dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Fenomena manfaat yang dirasakan perempuan melalui PKK di Desa Wonosari jika dikaitkan dengan penelitian oleh Abdul Khafidz dan Isna Fitria Agustina pada tahun 2024 dalam penelitiannya yang berjudul "Pemberdayaan Kelompok Usaha Perempuan melalui Pembiayaan Mikro di Badan Usaha Desa", terdapat kesamaan dalam hal pentingnya struktur organisasi yang mendukung agar pemberdayaan benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Penelitian mereka menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan perempuan membutuhkan struktur birokrasi yang jelas, SOP yang kuat, dan pembagian tugas yang efisien agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Wonosari, di mana manfaat dari program PKK dapat dirasakan langsung oleh perempuan karena adanya pengelolaan yang baik, distribusi peran yang jelas, dan pelatihan yang berdampak pada kemandirian ekonomi serta peningkatan kepercayaan diri. Perbandingan ini menegaskan bahwa manfaat dari pemberdayaan perempuan tidak hanya berasal dari kegiatan pelatihan semata, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen organisasi serta ruang partisipasi yang disediakan oleh struktur pelaksana program.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wonosari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, yang bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemberdayaan perempuan melalui PKK meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di tingkat desa, maka dapat disimpulkan bahwa program PKK di Desa Wonosari merupakan upaya strategis untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan desa. Pada indikator akses, program PKK di Desa Wonosari menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan luas untuk terlibat tanpa batasan usia maupun status. Pelatihan keterampilan seperti pembuatan tas talikur dapat diikuti secara terbuka dengan penyebaran informasi yang merata, misalnya melalui grup WhatsApp PKK. Hal ini memperlihatkan bahwa hambatan struktural relatif kecil, meskipun partisipasi masih dipengaruhi keterbatasan waktu akibat beban ganda dan ketergantungan pada dukungan anggaran desa. Pada indikator partisipasi, dalam program pemberdayaan perempuan melalui PKK Desa Wonosari menunjukkan keterlibatan yang cukup aktif meskipun masih terbatas pada sebagian kecil anggota. Pelatihan keterampilan tas talikur berhasil mendorong perempuan untuk terlibat secara langsung dalam praktik, berbagi pengalaman, serta memperkuat solidaritas kelompok. Namun, partisipasi tersebut belum berlanjut menjadi kegiatan produktif yang berkesinambungan karena keterbatasan pendampingan, dukungan pasca-pelatihan, dan akses pengembangan usaha. Selanjutnya, Pada indikator kontrol, pemberdayaan perempuan melalui program PKK di Desa Wonosari menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui mekanisme musyawarah dalam menentukan jenis keterampilan yang relevan. Namun, kontrol yang dimiliki masih bersifat relatif karena keputusan akhir sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya dukungan dana dari pemerintah desa serta regulasi penggunaan anggaran yang berlaku. Hal ini membuat perempuan tidak sepenuhnya bebas dalam merealisasikan ide atau usulannya, meskipun aspirasi mereka tetap menjadi pertimbangan utama. Sementara, Pada indikator manfaat, program PKK di Desa Wonosari melalui pelatihan pembuatan tas talikur terbukti mampu meningkatkan keterampilan, rasa percaya diri, serta membuka peluang ekonomi bagi perempuan dalam menunjang kesejahteraan keluarga. Namun, karena belum ada tindak lanjut berupa pendampingan dan dukungan usaha, manfaat program masih terbatas pada sebagian kecil peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, khususnya Ketua dan anggota PKK, serta para informan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penguatan program pemberdayaan perempuan melalui PKK serta pembangunan desa di masa mendatang.

REFERENSI

- [1] S. Hidayat, "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Kreatif melalui Pelatihan Pembuatan Kaset dari Limbah Kain," *J. Nonform. Educ. Community Empower.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–30, 2018, doi: 10.15294/pls.v2i1.23385.
- [2] N. A. Trisnawati, "Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Sukorame Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik," *Kaji. Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 02, 2017.

- [3] R. R. Hadiningsih, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok PKK Studi Pada Aktifis PKK Di Dasawisma Dahlia, Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan," 2020, *Fisip UIN Jakarta*.
- [4] S. M. Sari, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan di Bidang Politik di Provinsi Riau," pp. 1–85, 2019.
- [5] N. Azizah and M. F. Ma'aruf, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Bidang Pendidikan dan Keterampilan)," *J. Mhs. Unesa*, pp. 8–29, 2019.
- [6] A. Septiayani, "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Life Skill Melalui Program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan," 2023, *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- [7] I. Namira, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta," 2023, *Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD"*.
- [8] R. Wahyuni, "Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang strategi dan mekanisme gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua," 2022, *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*.
- [9] K. Nadliroh and R. Dewi, "Pelatihan Pembuatan Tas Tali Kur Sebagai Pemberdayaan Perempuan Di Desa Puhsarang Kecamatan Semen Kabupaten Kediri," *J. Abdi Masy.*, vol. 1, no. 2, 2018, doi: 10.30737/jaim.v1i2.155.
- [10] A. Y. Decaprio and I. F. Agustina, "Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Banjarebendo," *J. Publicuho*, vol. 7, no. 4, pp. 1896–1909, 2024, doi: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.547>.
- [11] R. Carollina and A. Juliarso, "Pemberdayaan Perempuan Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Desa Selamanik Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis," 2022.
- [12] P. A. Y. U. N. Putri Ayu Nanda, "Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Memberdayakan Perempuan Di Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar," 2024, *Universitas Sulawesi Barat*.
- [13] A. Khafidz and I. F. Agustina, "Empowering Women's Business Groups through Microfinance in Village Enterprises," *Indones. J. Cult. Community Dev.*, vol. 15, no. 3, Oct. 2024, doi: 10.21070/ijccd.v16i1.1139.
- [14] N. Kurniawati, "Partisipasi Perempuan Pada Program Pemberdayaan Masyarakat (PRODAMAS) Di Kelurahan Banjar Melati Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur," 2017, *Universitas Airlangga*.
- [15] S. Juslaeni, N. Wahid, and Riskasari, "Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 5, pp. 706–719, 2024, [Online]. Available: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/14137/7406>
- [16] Y. S. Setiawati, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan Capai Impian Dan Cita-Cita Dalam Mendorong Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kota Depok," 2023, *Universitas Nasional*.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.